

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, sebagai salah satu tuntutan reformasi adalah mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Salah satu cara mewujudkan Indonesia baru yang lebih demokratis tersebut adalah dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Tuntutan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat tersebut dimulai dengan ditetapkannya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Secara umum UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, karena pemerintah daerah di beri hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahan di daerah masing-masing dan juga mendapat wewenang yang luas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah guna dimanfaatkan bagi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Otonomi daerah adalah suatu pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pemerintah daerah mendapat wewenang dari pusat untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa visi. Visi dari otonomi daerah menurut Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid di antaranya :

¹ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(1) Membebaskan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon, berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaatnya, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah kedaerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, (2) Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat, (3) Desentralisasi adalah simbol trust (kepercayaan) pemerintah pusat kedaerah, sehingga mengembalikan harga diri pemerintahan dan masyarakat daerah. Visi otonomi daerah itu sendiri dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya.²

Salah satu dari manfaat desentralisasi adalah dapat mewujudkan sebuah demokratisasi di daerah dengan adanya pendidikan politik dalam masyarakat. Salah satu parameter dalam pelaksanaan demokrasi lokal dengan adanya Pilkada.³

Pada Pemilihan Umum, yang memiliki tugas dan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga atau badan yang mandiri dan terpisah dari cabang kekuasaan negara yang ada seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Sedangkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, tugas dan wewenang KPU tersebut dilimpahkan kepada KPUD, berdasarkan UU No. 12 Th. 2003 tentang pemilihan umum yang menyatakan KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum yang berada di daerah propinsi dan kabupaten/kota yang mengatur tentang mekanisme pemilihan di daerah masing-masing.⁴

² Syaukani.HR, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 173.

³ Bingham Powel, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, LP3M, Yogyakarta, 2005, hlm. 34-45.

⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan Pilkada adalah salah satu bentuk dari kebebasan yang diberikan oleh pusat untuk mengurus persoalan dalam pemilihan langsung. Pilkada adalah salah satu bentuk wewenang yang diberikan oleh pusat dalam bidang politik. Dengan adanya pemilihan kepala daerah yang ditentukan oleh daerah tentunya akan memberikan manfaat tersendiri bagi daerah yang bersangkutan. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkakada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkakada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkakada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah", dan telah di revisi menjadi UU No.8 Tahun 2015.

Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang ikut dalam melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 adalah Kota Bukittinggi. Ada lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Empat pasangan calon diajukan oleh koalisi partai politik dan yang lebih menarik ialah terdapat satu pasangan kandidat maju sebagai calon independen. Berikut tabel pasangan yang maju menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi:

Tabel 1.1
Daftar Peserta Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi
Periode 2015-2020

No	Nama pasangan calon	Partai pendukung
----	---------------------	------------------

Urut		
1	H.Taslim,S.Si dan H.Marfendi	PAN dan PKS
2	H.Febby,SST.Par dan Zulifkar Rahim	PPP,PKB dan Hanura
3	dr.H Harma Zaldi,S.Pb dan Ir.Hj.Rahmi Brisma	Golkar dan Nasdem
4	Muhamad Ramlan nurmatias,SH dan Irwandi	Perseorangan (Independen)
5	H.Ismet Amziz,SH dan Drs.Zulbari Majid,M.Pd	Demokrat,Gerindra dan PDI P

Sumber: Website KPU Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas peneliti melihat pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Taslim dan Marfendi yang dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selanjutnya pasangangan nomor 2 (dua) Febby dan Zulifkar Rahim diusung oleh tiga partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Pasangan nomor urut 3 (tiga) Harma Zaldi berpasangan dengan Rahmi Brisma diusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Nasional demokrat (NASDEM). Pasangan nomor urut 4 (empat) Muhamad Ramlan Nurmatias dan Irwandi berasal dari calon Independen. Pasangan nomor urut 5 (lima) adalah Ismet Amziz dan Zulbari Majid yang dicalonkan oleh Partai Demokrat, Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).

Pasangan nomor urut satu yaitu Taslim, merupakan mantan anggota DPR-RI dan pengurus DPP PAN berpasangan dengan Marfendi merupakan politisi dari Partai PKS. Pasangan nomor urut dua yaitu Febby pengusaha yang bergerak dibidang *tour and travel* di Kota Bukittinggi, Febby juga merupakan ketua DPW PKB Sumatera Barat, wakilnya adalah Zulifkar adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasangan nomor urut tiga yaitu Harma Zaldi adalah seorang *incumbent* wakil walikota

sebelumnya juga berprofesi sebagai dokter dan wakilnya Rahmi Brisma merupakan politisi PAN dan pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Bukittinggi. Pasangan nomor urut empat yaitu Muhamad Ramlan Nurmatias merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang infrastruktur dan berpasangan dengan Irwandi merupakan mantan sekretaris daerah Kota Payakumbuh. Muhamad Ramlan Nurmatias di tahun 2005 juga menjabat sebagai ketua KPUD Kota Bukittinggi. Pada tahun 2010 beliau juga pernah mencoba menjadi calon Walikota Bukittinggi berpasangan dengan Azwar Risman Taher, namun usaha tersebut gagal.⁵ Pasangan nomor urut lima Ismet Amziz merupakan mantan walikota periode sebelumnya yang memberinya status *Incumbent*, pada masa kepemimpinan walikota Djufri, Ismet Amziz adalah mantan Wakil Walikota Periode 2005-2010. Setelah Djufri terpilih menjadi anggota DPR-RI Ismet Amziz ikut dalam pemilu 2010-2015 berpasangan dengan Harma Zaldi dan terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.⁶ Wakilnya adalah Zulbahri merupakan mantan anggota DPR-RI dari Partai Gerindra

Semakin kita sadari bahwa wajah demokrasi di Indonesia dipenuhi oleh semangat dan gairah persaingan. Besarnya jumlah partai politik, sistem perhitungan berdasarkan suara terbanyak, pilkada (Gubernur dan walikota/Bupati), dan pemilihan presiden secara langsung semakin menegaskan era persaingan terbuka dalam demokrasi di Indonesia. Ditengah-tengah persaingan politik yang semakin intens, kehadiran modal politik menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pihak yang memiliki modal politik relatif besar dibandingkan dengan pesaingnya akan diuntungkan. Begitu juga sebaliknya,

⁵ Lihat skripsi Yovaldri Riki Putra 2010, *Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amziz-Harma Zaldi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010*, Skripsi, Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

⁶ Sebelumnya Ismet Amziz adalah wakil walikota di era Djufri, dan sempat menjadi pelaksana teknis sementara walikota Bukittinggi periode 2000-2005.

pihak yang memiliki modal politik jauh lebih kecil akan kesulitan untuk bisa bersaing apalagi memenangkan kompetisi politik.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem demokrasi dalam artian pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka masyarakat Kota Bukittinggi telah memilih pada tanggal 9 Desember 2015 siapa calon yang layak untuk menjalankan roda pemerintahan yang baru. Berbeda dari Pilkada pada tahun 2010, terdapat fenomena yang baru di kota Bukittinggi yaitu calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak diusung oleh partai politik mendapatkan perolehan suara yang dominan mengalahkan calon yang dicalonkan oleh partai politik sendiri.

Tabel 1.2
Hasil Perolehan Suara Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi
Periode 2015-2020

No Urut	Nama pasangan calon	Partai pendukung	Hasil Perolehan Suara
1	H.Taslim,S.Si dan H.Marfendi	PAN dan PKS	7053 suara (16,59 %)
2	H.Febby,SST.Par dan Zulifkar Rahim	PPP,PKB dan Hanura	1505 suara (3,54%)
3	dr.H Harma Zaldi,S.Pb dan Ir.Hj.Rahmi Brisma	Golkar dan Nasdem	4472 suara (10,52%)
4	Muhamad Ramlan nurmatias,SH dan Irwandi	Independen	17770 suara (41,80%)
5	H.Ismet Amziz,SH dan Drs.Zulbari Majid,M.Pd	Demokrat,Gerindra dan PDI P	11712 suara (27,55%)

Sumber: Website KPU Kota Bukittinggi 2015

Dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pasangan nomor urut satu Taslim-Marfendi memperoleh suara 7.053 suara (16,59 %), pasangan Febby-Zulifkar Rahim memperoleh total suara 1.505 suara (3,54%), pasangan nomor urut tiga yaitu Harma Zaldi-Rahmi Brisma memperoleh jumlah suara sebanyak 4.472

suara (10,52%), pasangan nomor urut empat yaitu Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi memperoleh total suara sebanyak 17.770 suara (41,80%) dan pasangan nomor urut lima yaitu Ismet Amziz-Zulbari Majid memperoleh total suara sebanyak 11.712 suara (27,55%).

Jumlah suara terbanyak dipegang oleh pasangan calon Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi yang berasal dari calon independen dengan total suara 17.770 yang berarti Pasangan Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi memimpin perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mengalahkan Calon *Incumbent* Ismet Amziz yang hanya menempati peringkat kedua sebanyak 11.712 suara (27,55%) dan calon *incumbent* lainnya Harma Zaldi yang hanya berada di peringkat keempat dengan mengumpulkan jumlah suara sebanyak 4.472 suara (10,52%).

Di Sumatera Barat sendiri kemenangan pasangan perseorangan sangat langka dan ini merupakan kemenangan pertama pasangan calon independen di Kota Bukittinggi maupun di Sumatera Barat. Dapat kita ketahui pada Pilkada serentak 2015 ada dua calon perseorangan yang ikut menjadi kontestan pemilu di Sumatera Barat yaitu di Kota Bukittinggi yaitu Muhamad Ramlan Nurmatias berpasangan dengan Irwandi dan di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu Rifa Yendi berpasangan dengan Zulhikmi, namun di Kabupaten Limapuluh Kota pasangan perseorangan kalah telak dengan hanya menduduki peringkat terakhir dari lima calon yang ikut bertanding dalam pilukada Limapuluh Kota.⁷

⁷ Diakses dari website: KPU Kabupaten Limapuluh Kota/hasil hitung pilukada 2016 kabupaten Limapuluhkota pada tanggal 11 Februari pukul 20:34 wib

Tabel 1.3
Hasil Perolehan Suara Per- Kecamatan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota
Kota Bukittinggi Periode 2015-2020

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Per Kecamatan		Total
1	H.Taslim,S.Si dan H.Marfendi	ABTB	1.847 Suara	7053 Suara
		Guguak Panjang	2.477 Suara	
		MKS	2.729 Suara	
2	H.Febby,SST.Par dan Zulifkar Rahim	ABTB	300 Suara	1.505 Suara
		Guguak Panjang	037 Suara	
		MKS	568 Suara	
3	dr.H Harma Zaldi,S.Pb dan Ir.Hj.Rahmi Brisma	ABTB	1.032 Suara	4.472 Suara
		Guguak Panjang	1.806 Suara	
		MKS	1.634 Suara	
4	Muhamad Ramlan nurmatias,SH dan Irwandi	ABTB	3.417 Suara	17.770 Suara
		Guguak Panjang	6.499 Suara	
		MKS	7.854 Suara	
5	H.Ismet Amziz,SH dan Drs.Zulbari Majid,M.Pd	ABTB	2.610 Suara	11.712 Suara
		Guguak Panjang	3.781 Suara	
		MKS	5.321 Suara	

Sumber: Website KPU Kota Bukittinggi 2015

Dari tabel di atas dapat kita lihat Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi mendapat perolehan suara yang lebih besar dari pasangan Ismet Amziz-Zulbari di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan dimana kedua pasangan calon tersebut merupakan warga yang berdomisili di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan. Di Kecamatan Guguak Panjang Pasangan Ramlan Nurmatias juga dapat memperoleh suara yang dominan dari pasangan Harma Zaldi-Rahmi Brisma, padahal pasangan tersebut adalah warga yang berdomisili di Kecamatan Guguak Panjang, di semua kecamatan

Pasangan Ramlan Nurmatias-Irwandi juga dapat unggul dari Febby-Zulifkar dan Pasangan Taslim-Mafendi.

Fenomena kemenangan pasangan perseorangan ini sangat menarik dilihat di Kota Bukittinggi dimana dalam sejarah Pilkada Kota Bukittinggi tidak pernah terjadi calon independen mengalahkan calon yang didukung oleh partai apalagi calon *incumbent*, dimana seharusnya calon *incumbent* lebih populer dari calon yang lain, namun hal ini tidak terjadi di Kota Bukittinggi. Dari sisi *track record* Ismet Amziz yang merupakan pamong senior di kota Bukittinggi sebelum menjadi walikota beliau juga pernah menjadi wakil walikota bukittinggi di era Djufri Walikota periode 2005-2010. Pengalaman ini seharusnya dapat memberi nilai tambah terhadap Ismet Amziz. Berbeda dengan Muhamad Ramlan Nurmatias calon perseorangan, beliau berprofesi sebagai pengusaha yang bergerak di sektor infrastruktur. Muhamad Ramlan Nurmatias juga pernah menjabat sebagai ketua KNPI Bukittinggi tahun 2002-2007 dan ketua KPU Kota Bukittinggi tahun 2005 yang memiliki andil atas pengembalian uang negara sebanyak 700 juta rupiah⁸, hal ini cukup mengharumkan namanya. Namun dalam modal manusia Muhamad Ramlan Nurmatias masih kalah jauh dari sisi pengalaman dari Ismet Amziz, karena Muhamad Ramlan Nurmatias belum pernah menduduki jabatan politik di Kota Bukittinggi.

Pengalaman yang berhaluan pada peningkatan kualitas manusia masing-masing calon walikota dan wakil walikota Kota Bukittinggi tahun 2015 tidak ada yang mendominasi, termasuk Ramlan Nurmatias sendiri sebagai pemenang beliau dan wakil walikota Irwandi sama-sama lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah

⁸ Opcit, skripsi Yovaldri Riki Putra, Hal 5

(UMSB) Bukittinggi.⁹ Sedangkan Ismet Amziz adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND) Padang dan calon wakil walikotanya adalah lulusan UHAMKA Jakarta.¹⁰ Para calon walikota dan wakil walikota ini sama-sama lulusan Sarjana (S1).

Wakil pasangan calon Ismet Amziz yaitu Zulbahri Majid adalah putra asli Kota Bukittinggi, beliau pernah menjabat sebagai ketua komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Partai Gerindra, ini menandakan beliau adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia.¹¹ Berbeda dengan Irwandi wakil dari pasangan independen, beliau adalah mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Sekretaris Kota Payakumbuh.¹²

Dilihat dari modal kelembagaan Ismet Amziz adalah ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi dan pada pilkada saat ini pasangan Ismet Amziz dan Zulbari Majid di dukung oleh beberapa partai besar di Kota Bukittinggi yaitu partai Demokrat, Gerindra dan PDI-P. Berbeda dengan Pasangan Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi yang maju sebagai calon independen,, hal ini membuat modal kelembagaan yang di miliki pasangan Ismet Amziz dan Zulbari Majid jauh lebih besar dari pasangan Muhamad Ramlan Nurmatias- Irwandi.

Dilihat dari perspektif budaya, kedua pasangan calon memiliki persamaan dan kekuatan yang sama yaitu sama-sama *Urang Kurai* ,penduduk asli kota Bukittinggi.¹³ Ramlan Nurmatias yang bergelar Dt.Nan Basa dari *Suku Kurai koto* dan Ismet Amziz

⁹ Diakses dari Website [http:// Ramlan-Irwandi,Profil](http://Ramlan-Irwandi,Profil), tanggal 18 Februari 2016 Pukul 23.00

¹⁰ Diakses dari Website [http:// Imam \(Ismet Amziz-Zulbahri Majid\),Profil](http://Imam (Ismet Amziz-Zulbahri Majid),Profil) tanggal 18 Februari

¹¹ Opcit,profil Ramlan-Irwandi

¹² Opcit,profil Ismet Amziz-Zulbahri Majid.

¹³ Ibid.

yang bergelar Dt.Rajo mangkuto dari *Suku kurai Selayan* yang memiliki porsi yang sama kuat dikalangan penduduk asli Kota Bukittinggi yang memiliki legitimasi atas modal budaya dan modal simbolik. Namun dalam hal ini Ramlan Nurmatias memiliki wakil Irwandi yang merupakan datuak suku asli *kurai* yang bergelar Dt.Batujuah dari *Suku kurai Pisang*, sehingga memperkuat modal budaya yang dimiliki oleh pasangan ini. Berbeda dengan wakil dari Ismet Amziz yaitu Zulbari yang tidak memiliki gelar adat *kurai* dan tidak memiliki modal budaya yang kuat di karenakan beliau lama berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau, hal ini membuat Zulbari tidak terlalu di kenal oleh masyarakat Kota Bukittinggi.

Sementara Melihat dari aspek kepemilikan harta kekayaan calon sebagai landasan untuk melihat modal ekonomi (uang) calon sangat penting. Karena dalam fenomena pemilihan umum secara langsung, pentingnya modal uang tidak terbantahkan lagi. Faktor pembiayaan merupakan faktor kritikal untuk sukses sebuah kampanye. Pembiayaan sosialisasi politik oleh kandidat dalam sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya yang sangat banyak. Biaya yang dikeluarkan untuk beberapa item seperti pengadaan baliho, spanduk, mobilisasi kampanye, iklan politik, aksi sosial, bahkan sewa konsultan politik, keseluruhan indikator diatas penting agar kandidat menjadi dikenal oleh pemilih. Adapun jumlah harta kekayaan para calon dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Daftar Harta Kekayaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi Periode 2015-2020

No Urut	Nama	Jabatan	Laporan Kekayaan
1	H.Taslim,S.Si	Calon Walikota	Rp.7.501.840.700

	H.Marfendi	Calon Wakil Walikota	Rp.486.745.933
2	H.Febby,SST.Par Zulifkar Rahim	Calon Walikota Calon Wakil Walikota	Rp.11.200.000 Rp.104.760.000
3	dr.H Harma Zaldi,S.Pb Ir.Hj.Rahmi Brisma	Calon Walikota Calon Wakil Walikota	Rp.3.232.325.496 Rp.12.931.488.020
4	Muhamad Ramlan Nurmatias,SH Irwandi,SH	Calon Walikota Calon Wakil Walikota	Rp.66.082.212.555 Rp.1.914.801.289
5	H.Ismet Amziz,SH Drs.Zulbari Majid,M.Pd	Calon Walikota Calon Wakil Walikota	Rp.1.417.151.906 Rp.2.168.340.148

Sumber: Website KPU Kota Bukittinggi

Pada tabel di atas dapat dijelaskan harta kekayaan yang dimiliki oleh para calon lebih didominasi oleh Muhamad Ramlan Nurmatias yang memiliki harta kekayaan Rp.66.082.212.555, melebihi jumlah harta kekayaan dari semua calon yang ada. Jauh melampaui jumlah harta kekayaan calon *incumbent* Ismet Amzis sebanyak Rp.1.417.151.906. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi pasangan perseorangan Ramlan Nurmatias-Irwandi karena memiliki modal ekonomi yang lebih besar dari pasangan lainnya.

Pemilu merupakan arena politik nyata dalam wajah demokrasi di Indonesia, dimana pada penyelenggaraan pemilu banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Para kandidat berupaya untuk merebut hati dari para pemilih, selain dari modal ekonomi yang dimiliki pasangan Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi sangat kuat dari pasangan Ismet Amziz-Zulbari Majid tidak serta merta menjadi alasan pasangan Muhamad Ramlan Nurmatias menang dalam pemilukada Kota Bukittinggi, hal ini bisa peneliti lihat dalam pemilu periode 2010-2015, Pasangan Zulkirwan Riva'i-Baharya memiliki harta kekayaan yang besar melebihi pasangan calon lain namun pasangan ini tetap kalah

dalam pemilukada tersebut.¹⁴ Berikut tabel harta kekayaan para calon walikota dan wakil walikota pilkada 2010-2015

Tabel 1.5
Daftar Harta Kekayaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bukittinggi Periode 2010-2015

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Daftar Kekayaan	Perolehan Suara
1	Muhamad Ramlan Nurmatias-Azwar Risman Taher	Golkar dan Gerindra	Rp.5.258.245.244 Rp.700.756.369	10.888 suara (25,79%)
2	Ismet Amziz-Harma Zaldi	Partai Demokrat	1.029.993.798 1.029.933.798	18.011 suara (42,79%)
3	Zulkirwan Rivai- Baharyadi	PAN,PKS, HANURA, dan PKPI	Rp.7.011.554.000 Rp.172.456.998	9.208 suara (21,81%)
4	Nursyamsi Nurlan- Yalvema Miaz	PPP dan PBB	Rp.6.676.000.000 Rp.1.230.294.902	3.004 suara (7,21%)
	Darlis Ilyas-Sobirin Rahmat	Koalisi Forlip: PKPI,PPPI, PPRN,PPD, PDS,PDIP, PBR,PSI,PKB, PNI-M,PDP ,Pakar Pangan,PMB, PDKB,PPDI,PDK dan Republikan	Rp,143.750.000 Rp.137.000.00	1.064 suara (2,52%)

Sumber: Yovaldri Riki Putra, 2010.

¹⁴ Opcit, Skripsi Yovaldi Riki Putra. hal 5

Apalagi dengan hadirnya peraturan KPU baru nomor 8 tahun 2015¹⁵ Tentang dana kampanye gubernur wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/ walikota dan wakil walikota yang di keluarkan oleh KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum dan pemilukada. membuat pasangan calon membatasi dana kampanye dimana tiap pasangan calon mempunyai besaran dana kampanye yang sama besar atas kesepakatan bersama.

Terdapat modal lain yang harus dimiliki oleh para kandidat. ketokohan dari seorang kandidat juga dapat mempengaruhi masyarakat. Pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih (*voting behaviour*) menjadi argumentasi peneliti melihat permasalahan diatas. Kecenderungan pemilih adalah memperhatikan kedudukan kontestan pemilukada dalam masyarakat dalam membangun sikap, persepsi dan orientasi politik. Studi Liddle dan Mujani¹⁶ menyimpulkan faktor ketokohan menjadi tulang punggung untuk meraih suara. Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi kalau dilihat dari pengalamannya masih ketinggalan ketokohnya dari pasangan calon Walikota Izmet Amziz-Zulbari Majid. Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi merupakan pasangan calon independen adalah salah satu kontestan dalam pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2015 yang telah di laksanakan, pasangan ini dengan modal politik yang tidak terlalu mendominasi dapat mengalahkan pasangan *Incumbent* Ismet Amziz-Zulbahri Majid. Calon perseorangan yang berprofesi sebagai pengusaha di sektor infrastruktur ini menjadi populer dihati masyarakat dengan memperoleh suara

¹⁵ Peraturan KPU nomor 8 tahun 2015, Tentang Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota

¹⁶ Syaiful Mujani and William R Liddle. Personalities, Parties and Voters. *Journal of Democracy* Volume 21,number 2 April 2010. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press

terbanyak dan mendominasi suara calon Walikota dan Wakil Walikota yang ada di Kota Bukittinggi.

Berangkat dari permasalahan yang penulis paparkan di atas pada tanggal 9 Desember 2015 Pilkada Walikota dan Wakil Walikota yang telah di selenggarakan. Menarik kita lihat pasangan Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi memperoleh jumlah suara tertinggi di Kota Bukittinggi sebagai calon perseorangan Independen. Dengan modal politik yang tidak terlalu mendominasi dibandingkan dengan Izmet Amziz yang merupakan *incumbent*, pada Pilkada walikota dan wakil walikota tahun 2015. Maka rumusan penelitian pada penelitian ini adalah : Bagaimanakah Modal Politik Pasangan Independen Muhammad Ramlan Nurmatias-Irwandi dalam Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

Mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Modal Politik Pasangan Perseorangan Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi dalam Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek akademis dan aspek sosial yaitu:

1.4.1 Secara akademis, Penelitian mengenai Modal Politik Pasangan Perseorangan Muhamad Ramlan Nurmatias-Irwandi dalam Pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2015 diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap bidang



akademis khususnya dalam hal konsepsi modal politik pada literatur Ilmu Politik.

1.4.2 Secara sosial, penelitian ini juga dapat memberikan sebuah informasi baru terhadap kepentingan masyarakat umum, dan juga pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih seorang calon pada pemilihan umum.

